

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dan diharapkan untuk melaksanakan tugas ini dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan yaitu dengan menyusun laporan keuangan sejalan pada standar akuntansi pemerintah yang sudah diterima secara umum, serta mematuhi prinsip keteraturan waktu dalam penyajiannya. Dalam konteks ini, organisasi perangkat daerah (OPD), yang merupakan entitas pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan dengan teliti dan cermat. Tindakan ini penting karena laporan keuangan yang akurat dan terperinci adalah cerminan dari semangat transparansi dan akuntabilitas yang dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembangkan sebuah sistem informasi yang dikenal sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD yaitu suatu aplikasi yang berfungsi selaku alat bantu bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. internal yaitu pihak yang berada di dalam instansi tersebut dan berkepentingan dalam pengambilan keputusan, maupun eksternal yaitu pihak di luar instansi yang mempunyai

hubungan dan kepentingan terhadap instansi tersebut lembaga atau instansi terkait.

Kemajuan teknologi informasi kini mengalami perkembangan yang amat cepat dan kompleks, dimana banyak perangkat teknologi bermunculan yang berperan sebagai penunjang kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, sosial, organisasi maupun komersial. Sistem informasi sangatlah penting dikelola untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi karena bertambah tingginya kualitas komunikasi dalam sebuah organisasi, akan sejalan dengan semakin baiknya integritas suatu organisasi.

Seluruh pihak yang terkait dalam perkembangan sistem informasi sekarang tanpa terkecuali haruslah tetap meningkatkan serta memperbarui teknologi untuk pemenuhan kebutuhan informasi secara cepat serta akurat sebagai landasan untuk menarik sebuah Keputusan (Fahdiansyah, 2017). Sehingga, dari perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan diperlukannya penyesuaian pada sistem informasi akuntansi.

Menurut Yudianata dan Erawati (2012), terdapat sebuah pandangan bahwa pengendalian internal akuntansi mempunyai dampak yang positif serta signifikan pada tingkat kepercayaan terhadap pelaporan keuangan. Pandangan ini mendapat dukungan dari hasil riset Yosef (2013) yang menyatakan bahwasanya sistem pengendalian internal di dalam konteks pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap mutu pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah. Namun, berbanding terbalik dengan temuan yang diungkapkan dalam penelitian Yendrawati (2013), yang menyimpulkan bahwasanya eksistensi sistem

pengendalian internal mempunyai dampak negatif pada kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Menurut Maharani dan Damayanti (2020), kualitas sistem informasi memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keseluruhan organisasi.

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas merupakan kemampuan sistem informasi akuntansi untuk memproses data keuangan dan menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi para pengambil keputusan (Fitrios et al., 2018). Kualitas sistem informasi akuntansi itu berfungsinya sistem informasi akuntansi secara andal, efisien dan efektif sebagai penyedia informasi akuntansi yang berkualitas (Susanto, 2017). Kualitas sistem informasi yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain: keandalan, integrasi dan aksesibilitas ((Bocij, Greasley dan Hickie (2015), Darma et al. (2018)), ketepatan waktu (Ong, Day dan Hsu, 2009), fleksibel dan efisien(Stair dan Reynolds, 2010).

Sesuai dengan visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat. PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan,

mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi yang dimaksud adalah 2 Program Aplikasi Komputer SIMDA.

Berdasarkan kebiasaan dan rutinitas yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah, biasanya SKPD telah sibuk dengan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang rencananya di jadwalkan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan. Proses tersebut mengakibatkan arus pertanggungjawaban bukti belanja dari Uang Persediaan (UP) yang diterima dari BUD kepada masing-masing SKPD sebagai modal awal pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan bergerak maju sehingga Bendahara Pengeluaran dan PPK bekerja menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang nantinya akan tercatat sebagai realisasi belanja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah dan Pemerintah Daerah

(PEMDA) berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pada saat ini dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berbagai organisasi di Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik karena tidak dapat disajikan tepat waktu, akurat dan relevan, tidak disajikan secara lengkap, tidak aman digunakan, sulit diakses, presentasi tidak mengikuti standar / pedoman dan kurang bisa dipahami oleh berbagai pengguna (Susanto 2017). Beberapa peneliti mengatakan sistem informasi akuntansi yang belum memiliki kualitas yang baik, seperti: pendidikan tinggi (Susanto 2017) lembaga keuangan ((Mulyani, Darma, dan Sukmadilaga (2016), Darma (2017)), Badan Usaha Milik Negara (Ladewi et al. 2017) dan lembaga zakat (Nurhayati and Susanto 2017). Tanpa sistem informasi akuntansi yang berkualitas, tidak akan ada informasi akuntansi yang berkualitas (Sacer et al,2006). PEMDA yang ingin memiliki Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas harus bisa: terintegrasi dan keandalan (reliability). Integrasi yang terkait dengan semua komponen di dalam sistem (hardware, software, brainware, database, prosedur dan jaringan komunikasi) bersinergi dalam SIA untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam membantu proses pengambilan keputusan (Satzinger, Jackson dan Burd, 2009). Keandalan berhubungan dengan kemampuan sistem yang dapat berfungsi dengan benar dan memberikan informasi yang akurat (Baltzan, 2014). Namun dalam kenyataannya, sistem informasi akuntansi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih jauh dari harapan atau belum

terintegrasi dengan baik, Belum sempurna nya Sistem Penatausahaan pada SIPD yang dikelola oleh Kemendagri membuat banyak Pemerintah Daerah masih menggunakan *Simda FMIS* yang merupakan produk dari BPKP.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, di ketahui bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi. Aplikasi yang di pergunakan dalam pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SIMDA .

Sementara itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang periode II 2022 telah berhasil mencapai opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) yaitu opini audit yang di keluarkan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian/ lembaga pemerintah. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nomor laporan hasil pemeriksaan no. 54/LPH/XVII.MDN/05/2022. Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan opini yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 telah memenuhi standar kewajaran tanpa ada pengecualian (WTP).

Namun meskipun demikian, tertulis dalam Ikhtiar hasil pemeriksaan (IHPS) pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahap kedua tahun 2022 masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam konteks sistem informasi akuntansi. Kendala-kendala tersebut meliputi masalah dalam

Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan yang lemah, kurang akuratnya pencatatan transaksi, ketidaksesuaian dalam proses penyusunan laporan dengan ketentuan yang berlaku, keterlambatan dalam penyampaian laporan oleh entitas, serta keterbatasan dan kurang memadainya sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang digunakan. Sumber: *IHPS RI semester II TA 2022*.

Berlandaskan latar belakang serta fenomena yang diuraikan sebelumnya maka dari itu penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab. Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di latar belakang, maka identifikasi masalah yang berkaitan pada judul penelitian ini yakni:

1. Masih ditemukannya kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah Daerah.
2. Sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi di kabupaten Deli Serdang belum seluruhnya efektif.
3. Teknologi informasi di Opd masih belum memperbarui teknologi untuk pemenuhan kebutuhan informasi secara cepat serta akurat .

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus dan mendetail dalam menjelajahi topik yang relevan, maka cakupan permasalahan penelitian ini telah

diberikan batasan yang meliputi aspek-aspek tertentu, yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi, serta penilaian terhadap efisiensi dari pengendalian internal yang diterapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut, sehingga yang menjadi permasalahan pada riset ini yaitu:

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam konteks latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan dalam mencapai beberapa tujuan penting, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Pemerintah Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak yang luas dan berarti bagi berbagai pihak yang terlibat:

1. Bagi peneliti, studi ini menciptakan peluang untuk mendalami materi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, yang pada akhirnya dapat diterapkan dengan baik dalam praktek di dunia kerja. Tidak hanya itu, riset ini pula diharapkan dapat memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan, membantu menguji penerapan teori di lapangan.
2. Penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi yang berharga bagi upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, serta teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan tujuan pemerintah dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dapat tercapai.
3. Hasil penelitian ini harapannya dapat berguna sebagai sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, memberikan bahan referensi yang berharga, dan mendorong pemahaman lebih mendalam terhadap topik yang relevan. Tidak hanya itu, hasil riset ini harapannya dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan mengenai masalah yang serupa dalam bidang penelitian ini.